

**DIALOG PERADABAN
MENGHADAPI ERA POSTMODERNISME
SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS-RELIGIUS***

Oleh : M. Amin Abdullah

Asal usul postmodernisme

Ketika wilayah perenungan dan pemikiran filosof tentang alam semesta telah diambil alih para ilmuwan dalam cabang ilmu-ilmu kealaman 'empiris', juga ketika renungan para filosof dalam bidang kemanusiaan telah diambil over oleh para ilmuwan sosial, maka orang bertanya-tanya apa manfaat dan jasa yang dapat diberikan oleh "filsafat". Orang meragukan apakah filsafat masih dapat menyumbangkan jasanya dalam era "dominasi" ilmu pengetahuan empiris baik dalam wilayah ilmu-ilmu kealaman maupun dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan.¹⁾ Bahkan dikalangan pemikiran keagamaan yang tipikal "konservatif", sudah lama filsafat dianggap sebagai suatu hal yang kurang berharga, sehingga tidak lagi patut untuk dipertimbangkan dalam proses pematangan dalam

¹⁾ Masih segar dalam ingatan kita adanya sekelompok filosof yang tergabung dalam kelompok "Vienna Circle" yang ingin membangun "Unified Science" dengan asumsi dasar bahwa metode-metode ilmu-ilmu pengetahuan baik yang bersifat empiris maupun yang logis-matematis telah mendatangkan manfaat yang begitu besar bagi umat manusia. Oleh karenanya, jika 'filsafat' masih ingin dipertimbangkan keberadaannya, maka metode keilmuan "positivistik" tersebutlah yang harus ditiru. Metafisika dan etika disingkirkan jauh dari arena percaturan keilmuan. Lebih lanjut, lihat Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, Macmillan Publishing Co, INC, New York, 1981, hh. 238, 247. Juga, Oswald Hanfling (Ed.), *Essential Readings in Logical Positivism*, Basil Blackwell, Oxford, 1981, khususnya bab. B,C dan E.

wilayah diskursus keagamaan.²⁾ Menurut doktrin agama-agama besar di dunia, khususnya yang bersifat monoteistik, "kebenaran" hanya dapat diperoleh lewat "wahyu". Sejauhmana peran akal dalam memahami wahyu, apakah pemahaman dan campuran tangan historisitas kemanusiaan dalam memahami wahyu masuk dalam katagori wahyu itu sendiri ataukah masuk dalam wilayah historisitas pemahaman manusia, kadang diketepikan begitu saja.

Ketika peran filsafat --baik dalam hal yang menyangkut Epistemologi, Etika maupun Metafisika-- ditepikan sebegitu rupa, tiba-tiba dalam dasa warsa ke 90-an masyarakat Indonesia khususnya³⁾ dikejutkan dengan istilah "baru" yang disebut-sebut dengan postmodernisme. Ditilik dari segi peristilahan yang muncul ke permukaan, jelas tampak bahwa istilah tersebut erat terkait dengan khazanah filsafat, tidak beda dari istilah-istilah seperti naturalisme, supernaturalisme, determinisme, modernisme, historisisme dan lain sebagainya. Jika peristilahan filsafat pada umumnya, hanya terbatas pada dataran kognitif, yang sering kali terlampau abstrak, sehingga sulit untuk dicerna dan dipahami oleh masyarakat luas, maka lain halnya dengan istilah postmodernisme. Istilah postmodernisme, yang sebenarnya juga ada pada dataran kognitif-abstrak, namun kemunculannya pada masa sekarang ini disertai dengan bukti sejarah yang kongkrit, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Sulit memberi definisi yang tepat tentang apa yang disebut dengan postmodernisme. Istilah postmodernisme dipergunakan dalam berbagai arti, dan tidak mudah untuk membuat atau merumuskan satu definisi yang bersifat *exhaustive*, yang dapat mencakup atau menjangkau semua dimensi arti yang dikandungnya. Istilah itu, pertama-tama dipakai dalam

²⁾ Sikap dan kecenderungan ini yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai "intellectual suicide". Selengkapnya dikatakan sebagai berikut : ... "Philosophy is, however, a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other diciplines, since it inculcates a much-needed analytical-critical spirit and generates new ideas that become important intellectual tools for other sciences, not least for religion an theology. Therefore a people that deprives itself of philosophy necessarily exposes itself to starvation in terms of fresh ideas -- in fact, it commits intellectual suicide". Lebih lanjut lihat *Islam & Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*, The University of Chicago Press, Chicago, 1982, h.157-8.

³⁾ Dapat dibandingkan dengan beberapa tulisan tentang postmodernism di harian *Kompas*, *Republika*, *Jawa Pos* dan lain-lain dalam tahun 1993.

bidang seni-arsitektur. Kalau ciri utama arsitektur modern adalah gedung-gedung tinggi menjulang yang sangat teratur, tanpa banyak variasi --sekedar sebagai contoh, lihat saja gedung-gedung di kota-kota modern dari New York, Jeddah sampai Jakarta-- maka arsitektur postmodernisme justru penuh dengan variasi. Dalam satu bangunan, berbagai gaya yang berasal dari berbagai masa sejarah arsitektur dapat digabungkan menjadi satu. Kita dapat melihat aspek-aspek dan corak tradisional dalam arsitektur postmodern. Gedung Dharmala di pusat ibukota Jakarta adalah merupakan model arsitektur yang tipikal postmodern.

Dari seni arsitektur, istilah postmodernism kemudian juga dipakai untuk bidang teori sastra, teori sosial, gaya hidup (life style), filsafat, bahkan juga mungkin agama. Inti pokok alur pemikiran postmodernisme adalah menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan baku, menolak dan menghindari suatu sistematika uraian atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai aneka ragam sumber.

Tampak dari situ bahwa alur pemikiran filosofis yang timbul tenggelam dalam sejarah peradaban manusia menampakkan "wajah"nya yang baru. Pergumulan metapisis antara pemikiran yang bersifat "Absolutism" Vs. "Relativism". antara "Universalisme" Vs "Particularism", antara "Objectivisme" Vs. "Subjectivisme", antara "Perennialism" Vs. "Historicism", tampak mencuat kembali dalam bentuknya yang baru. Menurut dugaan penulis, agaknya, jika tanpa dibarengi dengan latar belakang pendalaman dalam diskursus kefilosafatan, agak sulit mencermati alur dan memahami pemikiran postmodernisme baik untuk mengapresiasinya atau untuk mengkonter argumentasinya. Tak pelak lagi, orang seperti Ernest Gellner, seorang antropolog Inggris menganggap bahwa postmodernisme tidak lain dan tidak bukan adalah *Relativisme* dalam bentuk dan wajahnya yang baru.⁴⁾ Akbar S. Ahmed, seorang antropolog keturunan India/Pakistan yang tinggal di London, menambah unsur "media" sebagai pemicu dan sekaligus bagian yang tak terpisahkan dari wacana postmodernisme.⁵⁾

⁴⁾ Ernest Gellner, *Postmodernism, Reason and Religion*, Routledge, New York, 1992, h.24

⁵⁾ Akbar S Ahmed, *Postmodernisme Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terjemahan M. Sirozi, Penerbit Mizan, Bandung, 1992, h.27, untuk lebih detail hh.299-271.

Struktur fundamental⁶⁾ pemikiran postmodernisme

Begitu derasnya hembusan angin pemikiran postmodernisme kedalam masyarakat, baik lewat media elektronik seperti radio, radiocassette, TV, Facsimile, audiovisual, fotografi dan lain sebagainya maupun lewat media cetak seperti surat kabar, bulletin, majalah, jurnal-jurnal maupun buku-buku, menambah cepat masuknya pengaruh pemikiran postmodernisme kedalam perbincangan masyarakat luas. Apalagi, seringkali juga diharapkan atau lebih tepat diandaikan, bahwa postmodernisme akan menjadi *antidote* yang mujarab dari kepedihan yang ditimbulkan oleh gelombang "modernisme". Kenyataan ini merupakan faktor lain yang ikut menunjang mempercepat popullernya istilah tersebut, meskipun masyarakat pada umumnya belum sempat mencerna dan memahami secara baik apa inti pokok persoalan postmodernisme.

Ketika orang mencoba untuk mengkait-kaitkan alur pemikiran postmodernisme dengan fenomena agama secara umum, penulis teringat ketika temuan filosofis Thomas S. Kuhn dalam wilayah filsafat ilmu. Sejak tahun 60-an, Kuhn telah mempertanyakan dengan disertai bukti-bukti sejarah ilmu pengetahuan yang cukup akurat, tentang "dominasi" pemikiran positivistik dalam bidang keilmuan manusia secara umum. Temuannya, yang kemudian diterbitkan dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolutions*⁷⁾ cukup mengguncang "dominasi" paradigma keilmuan empiris-positivistik. Dengan bukti-bukti sejarah ilmu pengetahuan yang ia kumpulkan, Kuhn berkeyakinan bahwa faktor historis -- yakni faktor non-matematis-positivistik -- juga sangat penting untuk dipertimbangkan, ketika manusia ingin melihat bangunan paradigma keilmuan secara utuh. Dengan begitu, temuan Kuhn memperkuat alur pemikiran bahwa science bukannya *value-neutral*, seperti yang biasa terjadi dalam pemecahan persoalan-persoalan matematis, tetapi, sebaliknya, ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah "*value-laden*", yang erat terkait dengan nilai-nilai sosio-kultural, nilai-nilai budaya, pertimbangan politik praktis dan lain sebagainya.

Lantaran menggigitnya konsepsi filosofis Thomas S. Kuhn, maka hampir semua cabang keilmuan menyampaikan respon lewat berbagai

⁶⁾ Istilah "Struktur fundamental" sebenarnya tidak begitu disukai oleh alur pemikiran postmodernisme lantaran istilah tersebut menunjukkan sisa-sisa utopia "modernisme". Tapi istilah ini terpaksa digunakan disini sekedar untuk membatasi ruang lingkup pembahasan postmodernisme yang begitu luas.

⁷⁾ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, 1970. Menurut hemat penulis, karya Kuhn ini mempunyai andil yang cukup berarti di dalam menyulut munculnya alur pemikiran postmodernisme, khususnya yang terkait dengan diskursus metodologi keilmuan.

versi yang dianggap cukup mewakili nuansa pemikiran yang selama ini berkembang dalam disiplin ilmu masing-masing. Para ilmuwan melihat seberapa jauh pengaruh, implikasi dan bahkan aplikasi dari konsepsi pemikiran filsafat keilmuan Kuhn dalam bidang sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, filsafat, budaya dan agama.⁸⁾

Untuk itulah, maka untuk melihat lebih jauh keterkaitan antara alur pemikiran postmodernisme dengan pemikiran kontemporer, terlebih dahulu perlu diuraikan secara ringkas struktur fundamental pemikiran postmodernisme. Lewat jendela struktur fundamental tersebut, dicoba kemudian melihat respon, relevansi dan tantangan yang dihadapi oleh diskursus pemikiran keagamaan secara khusus, lebih-lebih, dalam hubungannya dengan era pertemuan berbagai budaya & peradaban dunia dalam era globalisasi.

Untuk alasan praktis-ekonomis, dalam upaya pemetaan wilayah pemikiran postmodernisme, penulis melihat adanya 3 (tiga) fenomena dasar yang menjadi tulang punggung arus pemikiran postmodernisme. Penulis tidak beranggapan bahwa hanya ketiga ciri yang akan diuraikan berikut ini yang akan secara serta merta dapat menerangkan fenomena alur pemikiran postmodernisme, tetapi disana masih banyak ciri dan fenomena lain yang mungkin lebih patut untuk dipertimbangkan. Tetapi, sebagai usaha awal pemetaan wilayah pemikiran postmodernisme, maka hanya 3 (tiga) ciri dasar yang ingin diungkapkan disini tanpa menutup kemungkinan adanya ciri atau kecenderungan lain yang sebenarnya harus dipertimbangkan juga. Adapun ketiga ciri dasar atau yang penulis istilahkan dengan struktur fundamental pemikiran postmodernisme adalah 1) deconstructionism, 2) relativism dan 3) pluralisme,⁹⁾

⁸⁾ Gurry Gutting (Ed.), *Paradigms and Revolutions : Appraisals and Applications of Thomas Kuhn's Philosophy of Science*, University of Norte Dame Press, Notre Dame, 1980.

⁹⁾ Secara Ijtihady penulis mengambil ketiga struktur fundamental alur pemikiran postmodernisme dari kedua buku tersebut di atas, yakni karya Akbar S. Ahmed dan Ernest Gellner.

1. Deconstructionism¹⁰⁾

Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah "mapan" dalam era "modern", baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga dalam ilmu-ilmu kealaman (Fisika, biologi, dsb.) yang selama ini dianggap telah 'baku', -- yang biasa disebut dengan sebutan 'grand theory' -- dipertanyakan ulang oleh alur pemikiran postmodernisme. Mengapa ?

Seperti telah diketahui bahwa teori-teori ilmu sosial "modern" mengandaikan adanya struktur dan konstruksi "baku", yang bisa dibangun secara kokoh dan dapat berlaku secara universal. Apa yang disebut "grand theory" begitu hebatnya, sehingga orang percaya berlebihan terhadap kemampuan teori tersebut. Grand theory dianggap dapat menerangkan berbagai gejala sosial yang ada dimanapun adanya. Meskipun konstruksi demikian cukup membantu untuk memahami persoalan sosial-kemasyarakatan, tapi konstruksi "baku" dan berbau "otoriter" seperti itu dianggap terlalu skematis dan terlalu menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya hendak ditelaah. Dominasi teori-teori besar menutup kemungkinan munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu memahami realitas dan memecahkan persoalan. Klaim adanya metodologi yang "baku", "standard", yang tidak dapat diganggu gugat, itulah yang ditentang oleh orang-orang seperti Paul Feyerabend¹¹⁾

Sebagai contoh sederhana, "Grand Theory" Weber tentang hubungan antara Etika Protestan dan semangat kapitalisme. Apakah teori Weber tersebut dapat dipakai untuk menerangkan suatu budaya tertentu selain budaya Eropa? Banyak ilmuwan sosial berkeyakinan demikian. Robert Bellah, umpamanya, menerapkan teori Weber untuk melihat

¹⁰⁾ Istilah "Deconstructionism" sebenarnya dimunculkan kepermukaan oleh failasuf Perancis Jacques Derrida (Lahir 1930). Istilah 'dekonstruksi' sendiri berhubungan erat dengan persoalan tradisi kebahasaan dan tradisi teks tertentu. Untuk memahami teks secara baik, orang harus 'berani' melakukan "pembongkaran" (dekonstruksi) terhadap teks-teks. Dalam pemikiran Islam, M. Arkoun mencoba mempraktekkan metodologi pembongkaran teks keagamaan Islam baik dalam Tafsir, Fiqh, maupun Kalam, Lihat bukunya, *Tarikhyyatu al-Fikr al-Araby al-Islamy*, juga *al-Fikr al-Islamy : Qira'ah Ilmiyyah*, keduanya terjemahan Hashim Shalih, Markaz al-inma' al-Qaumi, Beirut, 1986, dan 1987. Hasan Hanafi juga disebut-sebut seorang pemikir Muslim yang hendak mengaplikasikan metode pembongkaran teks. Lihat bukunya *Min al-Aqidah ila al-Tsaurah*, vol. I-V, Maktabah Madbuli, Kairo, 1988.

¹¹⁾ Paul K. Feyerabend, *Against Method : Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, London New Left, 1975.

masyarakat Jepang.¹²⁾ Dia berkeyakinan, seperti Weber, ada korelasi positif antara Etika Budhisme - setelah restorasi Meiji - dengan semangat ekonomi dan modernisme di Jepang. Namun secara kritis, pemikiran postmodernis akan mempertanyakan ulang validitas teori tersebut. Pertanyaan yang mengganggu adalah mengapa Etika Budhisme yang ada di Jepang tidak sama dengan etika Budhisme yang ada di Vietnam, Srilangka, Muangthai atau Kamboja?

Apakah gerak proton-elektron dapat diramalkan lewat pengulangan sebab-akibat yang bersifat deterministik? Para ilmuwan pisika yang beraliran deterministik-modernis percaya demikian. Fisikawan postmodernis tidak lagi percaya pada anggapan seperti itu. Menurut mereka, uraian deterministik kurang dapat menjawab persoalan realitas pisika yang sesungguhnya. Fisikawan postmodernis seperti Heisenberg tidak lagi percaya kepada adagium seperti itu.¹³⁾ Baginya, gerak proton-elektron tidak dapat ditebak dan tidak dapat diramalkan seperti halnya ketika orang melihat anak kecil yang ada ditengah lapangan. Sulit ditentukan apakah anak tersebut akan bergerak ke kanan atau ke kiri atau ke arah lain.

Apa kriteria 'sastra' yang baik atau unggul? Jika ada sastra yang disebut baik, apa kriterianya? Apakah sastra unggul adalah sastra yang disetir oleh kaum bangsawan, sastra kraton atau sastra rakyat biasa? Banyak sastrawan yang tidak sepakat bahwa sastra yang baik adalah sastra "gedongan" atau sastra "kraton". Pemikiran postmodernis dalam bidang sastra tidak setuju adanya cara pandang yang berstandar "tunggal". Jika hanya sastra kraton yang dianggap sebagai paradigma tunggal kesusasteraan yang baik dan representatif, lalu dimana letak sastra rakyat biasa?. Menurut hemat penulis, budaya "plesetan" adalah juga contoh budaya postmodernis dalam wilayah kesenian dan seni panggung khususnya.

Para protagonis pemikiran postmodernisme tidak meyakini validitas "konstruksi" bangunan keilmuan yang "baku", yang "standard" yang telah disusun oleh generasi "modernis". Standar itu dilihatnya terlalu kaku dan terlalu skematis sehingga tidak lagi cocok untuk melihat 'realitas' yang jauh lebih rumit. Dalam teori sosiologi "modern", para ilmuwan cenderung untuk melihat gejala keagamaan sebagai wilayah pengalaman yang amat sangat bersifat 'individual'. Pengalaman itu tidak terkait dan dipisahkan sama sekali dari kenyataan yang hidup dan realitas

¹²⁾ Robert. N. Bellah, *Religi Tokugawa : Akar-Akar Budaya Jepang*, terjemahan Wardah Hafidz & Drs. Budiharga, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

¹³⁾ John Lukacs, "Quantum Mechanics and the End of Scientism" dalam Richard Olson (Ed.), *Science As Metaphor*, Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmont, California, 1971, h. 294.

sosial yang ada. Jangankan sampai mengkaitkannya dengan politik. Pengaitan antara kehidupan beragama dan kehidupan politik dianggap tabu, lantaran memang demikianlah konsepsi 'modern' (post-enlightenment) sosiologi agama. Paradigma pemikiran sosiologi agama yang demikian sudah dianggap tidak dapat menjelaskan kenyataan dan realitas pengalaman keagamaan yang sekarang ini tumbuh berkembang dan dipahami oleh para penganut agama-agama, lebih-lebih Islam. Konsepsi pemisahan antara wilayah 'gereja' dan wilayah "negara" --pemikiran itu sendiri sebenarnya adalah hasil pergumulan sejarah yang panjang dalam kebudayaan Eropa "modern"-- terlalu amat sangat sederhana sehingga dalam banyak hal tidak dapat menjelaskan realitas keagamaan secara lebih utuh, arif, dan mendalam.¹⁴⁾

Era postmodernisme ingin melihat suatu fenomena sosial, fenomena keberagaman, realitas fisika, apa adanya, tanpa harus terlebih dahulu **terkurung** oleh anggapan dasar dan teori "baku" yang diciptakan pada masa "modernisme". Konstruksi atau bangunan yang telah dengan susah payah dibangun oleh generasi modernisme, era post-enlightenment ingin "dirubah", "diperbaiki", "disempurnakan", oleh para pemikir postmodernis. Upaya-upaya seperti itu, dengan bebas penulis sebut dengan istilah "deconstructionism" yakni mempertanyakan ulang (membongkar) adagium-adagium yang sudah "mapan", yang sudah "standard" yang dibangun oleh pola pikir modernisme, untuk kemudian dicari teori yang lebih relevan untuk memahami kenyataan masyarakat, realitas keberagaman dan realitas alam yang ada sekarang, jauh dari masa ketika teori-teori yang sudah "standard" tersebut dibangun.

2. Relativism

Diatas disebut-sebut Thomas S. Kuhn sebagai prototip pemikir yang mendobrak keyakinan para ilmuan yang bersifat positivistik. Pemikiran positivisme memang lebih menggaris bawahi validitas hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial yang bersifat universal, yang dapat dibangun oleh rasio. Mereka kurang berminat untuk melihat faktor "historis" yang ikut berperan dalam pengaplikasian hukum-hukum tersebut.

Masih seangkatan dengan Weber, Immanuel Kant adalah seorang filosof yang paling vokal mempertahankan nilai-nilai universal yang ada dalam wilayah moralitas. Secara ontologis, nilai-nilai moralitas yang bersifat universal-transendental tersebut diyakini tidak mengenal pengaruh sosial-budaya dimana manusia dibesarkan. Nilai-nilai moralitas

¹⁴⁾ John L. Esposito, *"The Islamic Threat : Myth or Reality?"* Oxford University Press, News York, 1992, h.198-9.

yang bersifat *transendental-universal* dipertahankan oleh Kant dalam karyanya yang monumental.¹⁵⁾ Namun, pemikiran Kant dikritik oleh Hegel. Hegel lebih menekankan aspek historisitas dari pada *transendentalitas*. Ia menganggap pemikiran Kant sebagai *ahistoris-formalistik*.

Menurut hemat penulis, pemikiran Hegel inilah yang banyak diperhatikan dan dicermati oleh para pemikir pada parohan kedua abad ke 20. Faktor sosial budaya amat mempengaruhi tata nilai yang berkembang dalam era tertentu dalam wilayah tertentu. Sebagai contoh, pengertian 'crime' (kejahatan). Secara formal-intelektual, pengertian "crime" memiliki benang merah yang sama antara satu budaya dan budaya yang lain. Namun, dalam aspek 'historitas' atau kesejarahan, bentuk *material* dari suatu bentuk "crime" (kejahatan), antara yang satu dan yang lain adalah sangat berbeda. Dengan adanya perbedaan secara *material* tersebut, maka para pengamat cenderung melihatnya sebagai "relatif". Apalagi jika disebut "white collar crime", (kejahatan kerah putih) maka agak sulit menyamakan dengan begitu saja antara kasus yang terjadi dalam satu wilayah (budaya, bangsa, negara, ras, suku) dengan kasus yang terjadi dalam budaya yang lain. Isu kontemporer yang lagi hangat diperbincangkan adalah HAM. Negara-negara barat-modern berpegang teguh adanya HAM yang sifatnya Universal -- yang tidak mengenal faktor sejarah dan budaya setempat --, tetapi negara-negara dunia ketiga bersikokoh untuk mempertahankan HAM yang disesuaikan dengan situasi budaya dan kondisi sosial masing-masing negara. Dalam hal ini, agaknya, negara-negara industri modern mempertahankan pemikiran Immanuel Kant, sedangkan negara-negara dunia berkembang mempertahankan ide-ide Hegel. Apakah keduanya harus merupakan diskursus yang bersifat 'tesis' dan 'antitesis', yang bersifat antagonistik, ataukah, merupakan 'sintesis' antara keduanya adalah persoalan yang sedang diperdebatkan dalam forum internasional.

Manifestasi pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya (nilai-nilai, kepercayaan agama, tradisi, budaya dan lain-lain) tergambar dalam teori-teori budaya yang dikembangkan oleh disiplin antropologi. Dalam pandangan antropolog, tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dan yang lain. Budaya Amerika, sudah barang tentu berbeda dari kebudayaan Eropa. Begitu juga "praktek" keberagamaan Islam di Middle East akan berbeda dari praktek keberagamaan Islam yang ada di Asia Tenggara. Nilai-nilai budaya amat sangat beranekaragam sesuai

¹⁵⁾ Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason*, terjemahan Lewis Whis White Beck, Macmillan Publishing Company, New York, 1985, h.34-5.

latar belakang sejarah, geografis, demografis, sosial-budaya dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, dalam persoalan sosial-budaya amat sangat sulit untuk dicari persamaan secara tepat antara yang satu dan lainnya seperti halnya rumusan matematis-positivistik $2 \times 2 = 4$.

Pemikiran demikian berimplikasi terhadap bangunan tata nilai secara luas. Nilai-nilai budaya adalah bersifat 'relatif', dalam arti, tidak dapat disama sebangunkan seperti perhitungan matematis. Kebiasaan dan nilai yang berlaku di satu tempat tertentu sulit dapat diterapkan setepat-tepatnya seperti semula adanya ditempat lain. Modifikasi disana sini pasti terjadi. Ibarat orang belajar bahasa asing, maka sependai-pandainya seseorang mempelajari bahasa asing, masih saja tetap ada hal-hal yang tidak dapat diserap dalam belajar bahasa tersebut. Aspek perasaan, kebiasaan yang spesifik, ungkapan cinta, sedih, gembira, kadang sulit untuk diekspresikan lewat terjemahan bahasa yang diucapkan secara lesan. Dengan begitu, menurut alur pemikiran postmodernisme, wilayah bahasa, budaya, cara berpikir dan agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat kebiasaan budaya masing-masing sehingga sulit untuk ditarik garis lurus yang dapat menyamaratakan antara yang satu dan lainnya.

Dalam dikursus studi agama kontemporer, hal ini erat terkait dengan subjektifitas. Pengalaman beragama (religious experience) yang bersifat subjektif sangat digarisbawahi oleh para ilmuwan agama-agama. Dalam menghayati agama, kamus objektifitas agak sulit untuk diterapkan, kecuali dengan mengesampingkan dan mengorbankan hal-hal kecil yang sangat pokok dalam otentisitas pengalaman keberagamaan seseorang. Pengalaman beragama hampir dapat dipastikan dipengaruhi juga oleh latar belakang keluarga, pendidikan, ekonomi, lingkungan dan begitu seterusnya. Dengan demikian, pemikiran postmodernisme sangat kritis terhadap berbagai uraian atau penjelasan yang berbau objektif, matematis, absolut, universal, seperti yang diidealkan dalam bidang keilmuan dan pemikiran falsafah era modernisme.

Kalau kecenderungan pemikiran postmodernism ini banyak diyakini orang muncul diabad 20 ini, agak mengherankan, jika pemikiran Islam abad tengah yang diwakili oleh al-Ghazali (W. 1111) juga mengemukakan hal yang sama. Dengan argumen yang sedikit berbeda, Ghazali sama sekali tidak percaya adanya nilai-nilai moral yang bersifat rasional-universal-absolut. Menurutnya, nilai-nilai ditentukan oleh

wahyu, dalam hal ini al-Qur'an dan aturan-aturan Syariah.¹⁶⁾ Dalam era sekarang ini, seorang pemikir Islam kontemporer Seyyed Hossein Nasr secara vokal menentang konsepsi "relativisme" yang dikaitkan dengan historicisme. Baginya, tidak ada relativisme yang absolut lantaran hal itu akan menghilangkan "normativitas" ajaran agama, tetapi juga tidak ada pengertian "absolut" yang benar-benar absolut, selagi nilai-nilai yang absolut itu *dikurung* oleh historisitas-kemanusiaan itu sendiri. Mirip-mirip ciri pemikiran postmodernisme yang tidak menyukai hal-hal yang "baku", "standard", "mapan", Nasr mengemukakan nilai-nilai agama yang disifatnya sebagai "*relatively absolut*". Dengan demikian, kita diajak melihat adanya sisi nilai yang bersifat "normatif" yang bersumber dari wahyu, disamping juga sekaligus mengenal sisi "relativitas" kesejarahan dan yang melekat pada diri manusia itu sendiri.¹⁷⁾

3. Pluralisme

Akumulasi dari berbagai model dan mode berpikir diatas adalah era yang disebut-sebut dengan era-pluralisme.

Era pluralisme budaya, era pluralisme agama, era pluralisme teknologi dan begitu seterusnya. Dibalik ungkapan itu terkandung maksud bahwasanya sangat sulit untuk mempertahankan "paradigma tunggal" dalam diskursus apapun. Semuanya serba beranekaragaman, semuanya serba perlu dipahami dan didekati dengan multidimensional approaches.¹⁸⁾

Lihatlah segala fenomena yang ada dihadapan kita. Budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, sosial, suku, pendidikan, ilmu pengetahuan, militer, bangsa, negara, belum lagi aspirasi politik, semuanya menampakkan wajahnya yang pluralistik. Dalam hubungan ini "paradigma tunggal" seperti yang dikedepankan oleh pendekatan kebudayaan Barat-modernis-developmental, baik dalam segi keilmuan maupun lainnya telah dipertanyakan keabsahannya oleh pemangku

¹⁶⁾ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, al-Maktabah al-Amirah, Kairo, 1322 (1937), h. 56-7; juga *Mi'yar al-Ilm*, Matba'ah Kurdistan al-'Ilmiyyah, Mesir, 1329, h 112-4, 118; 122; juga *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, Nur Matbasi, Ankara, 1962, 167, 182 dan 189-90.

¹⁷⁾ Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred*, Suhail Academy, Lahore, 1988, h. 280-303, khususnya h. 294.

¹⁸⁾ Bandingkan dengan tulisan penulis "Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya : Tentang Klaim Kebenaran dan Masa Depan Ilmu Agama", *Ulumul Qur'an*, No.1, Vol IV, th.1993, h.88-96.

budaya-budaya diluar budaya "modern" (post-enlightenment). Dalam bidang ilmu-ilmu ketimuran (orientalisme), telaah tajam Edward Said tentang dominasi paradigma tunggal Eropa mulai dipertimbangkan oleh kalangan ilmuan sosial dan keagamaan.¹⁹⁾

Era pluralitas ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak bangsa sejak dahulu kala, namun gambaran era pluralisme saat itu yakni "tempo doeloe", belum sejelas seperti era sekarang. Hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan era pluralisme budaya dan agama ini semakin dihayati dan dipahami oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Jika disebut era pluralisme, khususnya, dalam hubungannya dengan agama, maka, dalam masyarakat intern umat beragamapun terjadi fenomena pluralisme tersebut, setidaknya dalam nuansa aspirasi, kepentingan, dan cara berpikir dari para penganut agama tersebut. Dalam kenyataannya, hal ini akan semakin diperjelas oleh munculnya berbagai organisasi sosial keagamaan, sejak dari kepemudaan, kewanitaan, sosial politik, ekonomi, pendidikan maupun profesi lain-lainnya. Dalam hubungan ini, ada baiknya kita juga tidak melupakan adanya kategorisasi pemikiran "modernisme", "fundamentalisme", "mahdiisme", "traditionalisme" dan begitu seterusnya.²⁰⁾

Untuk masyarakat Indonesia sendiri, dari ketiga fenomena dasar ciri pemikiran postmodernisme, tersebut, agaknya fenomena yang terakhirlah yang lebih dapat diresapi oleh masyarakat luas. Latar belakang sejarah bangsa menjelaskan dengan sendirinya kenyataan pluralisme didalam tubuh bangsa Indonesia, baik dilihat dari suku, ras, agama, maupun budaya. Kesadaran pluralisme budaya dan agama ini kemudian diperkuat oleh bantuan alat-alat komunikasi modern seperti TV, transportasi dan lain-lain sebagainya. Masih agak sulit ditemukan diluar negeri Indonesia, fenomena pluralisme agama yang jelas-jelas ditayangkan dalam siaran nasional di TV, dimana dalam satu minggu, tidak kurang dari 5 macam keyakinan atau agama muncul dalam tayangan siaran nasional.

¹⁹⁾ John L. Esposito, *Op.cit.*, h. 202. Juga bandingkan dengan Frank Whaling, "The Study of Religion in a Global Context", dalam Frank Whaling (Ed.), *Contemporary Approaches to the Study of Religion*, Vol. I, Mouton Publishers, Berlin, 1984, h. 396-7.

²⁰⁾ Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in the Modern World*, Foundation for Traditional Studies, Kuala Lumpur, 1988, h. 75-95.

Implikasi postmodernisme terhadap pemikiran keagamaan

Mau tidak mau, suka atau tidak suka, arus pemikiran postmodernisme akan merambah ke relung-relung pemikiran manusia dimanapun mereka berada. Cepat atau lambat, pemikiran postmodernisme akan berpengaruh dan mewarnai hubungan antar agama, hubungan antar kebudayaan dan peradaban sekaligus. Persoalannya adalah apakah cara dan model berpikir postmodernisme --yang setidaknya, mempunyai tiga ciri terurai diatas-- akan dapat merubah, memperlemah atau memperkuat dan memperteguh budaya lokal dan kehidupan beragama tertentu? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab secara instant, baik dengan jawaban positif 'ya' maupun jawaban yang bersifat negatif 'tidak'. Banyak faktor yang saling berkait kelindang antara pola pikir postmodernis dan pemikiran keagamaan, serta faktor saling pengaruh mempengaruhi antara keduanya, sehingga menjadikan sulitnya menjawab pertanyaan tersebut. Kecuali, jika kita berkeyakinan bahwa kehidupan beragama adalah ibarat kehidupan di sebuah pulau terpencil, yang tidak akan tersentuh atau terpengaruh oleh kebudayaan modern yang merambah dimana-mana. Namun demikian, dalam era postmodernisme banyak orang berharap bahwa agama dapat berperan sebagai filter dari berbagai pengaruh negatif dari proses modernitas dan postmodernitas itu sendiri.

Sebelum menjelajahi persoalan terkait, kita kembali terlebih dahulu kepada pertanyaan apakah alur pemikiran dekonstruksi --seperti terurai di atas-- telah pula memasuki wilayah keberagamaan manusia? Jika yang dimaksud dengan pemikiran dekonstruksi adalah sejenis kritik, penolakan, sanggahan yang argumentatif, kounter argumen yang penuh bijak, terhadap pemikiran dan keyakinan beragama yang sudah 'baku', 'mapan' dan 'standard', maka secara *sosiologis*, dalam wilayah kehidupan beragama manusia itu sendiri, hal itu juga seringkali terjadi. Apa yang diistilahkan dengan 'ortodok' atau aliran 'mainstream', tidak lain dan bukan, adalah mirip-mirip wilayah 'normal science' dalam peta filsafat ilmu. Oleh para praktisi di lapangan, wilayah "normal science" dianggap telah "baku", "standard", "mapan" sehingga tidak boleh dirubah-rubah Gerakan Paderi di Minangkabau, atau bahkan gerakan Wahabi pada abad-abad sebelumnya adalah merupakan contoh kongkrit dalam kasus ini. Bahkan dalam jaman klasikipun, diskursus seperti itu seringkali terjadi, baik antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, antara ahli Sunah dan Syi'ah, antara paham tradisionalism dan modernisme dan begitu seterusnya. Pendek kata, jika terjadi proses pembekuan (conservatism) dalam wilayah pemikiran keagamaan, dan yang kemudian oleh sebahagian penganut agama yang bersangkutan dilihat adanya keganjilan-keganjilan (anomali-anomali) yang melekat -- barangkali lebih

tepat disebut 'dibakukan' oleh para pelaku sejarah -- maka dengan sendirinya akan muncul ide-ide 'baru' yang ingin mempersegar, mendinamisir ajaran ortodok yang telah 'mapan' dan 'standard' tersebut.

Dalam hubungan ini, munculnya gerakan-gerakan sempalan (splinter group) di berbagai tempat di dunia adalah mirip-mirip dengan gerakan postmodernisme yang ingin merubah, memperbaiki, membongkar, serta membangun kembali (reconstruct) bangunan pemikiran keagamaan yang dianggapnya kurang peka lagi terhadap tantangan perkembangan dan perubahan sejarah yang dihadapi.²¹⁾ Memang dalam melewati tahapan yang krusial ini perlu dicermati lebih lanjut apakah yang diusahakan dan diinginkan untuk dirubah dan diperbaharui tersebut adalah konstruksi bangunan dasar keberagamaan secara keseluruhan, ataukah cuma wilayah periperial atau wilayah "interpretasi" terhadap ajaran agama? Penulis sendiri meragukan jika yang ingin dirubah atau diperbaiki atau disempurnakan itu adalah struktur bangunan dasar secara total-keseluruhan. Dengan lain ungkapan, bahwasanya wilayah *hard core* dari pada wahyu serta dimensi normativitas ajaran agama akan tetap seperti itu adanya, dan hanya wilayah "interpretasi" ajaran agama tertentu yang lebih bersifat historis-relatif --yang masih akan berkembang sesuai dengan perkembangan akal budi dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia-- yang akan terkena proses dekonstruksi. Terjadinya proses dekonstruksi justru menunjukkan adanya "dinamika" keberagamaan manusia dalam arti yang sesungguhnya.

Lain halnya jika proses dekonstruksi itu merambah masuk wilayah rivalitas kebudayaan dan peradaban. Disini, peranan pers sangat menentukan tingkat implikasi positif maupun negatif yang akan ditimbulkannya. Pers "modern" dapat merubah sesukanya proses perjalanan dekonstruksi yang sebenarnya berjalan wajar dan alami, menjadi begitu akut, dibesar-besarkan dan didramatisir²²⁾ "Changing paradigm" serta proses dekonstruksi dalam wilayah budaya dan peradaban disebut-sebut oleh pers Barat-modern sebagai "clash of

²¹⁾ Dalam wilayah pemikiran Islam "modern", reformulasi atau rekonstruksi konsepsi teologi Islam klasik pernah diupayakan oleh Muhammad Iqbal. Lihat karyanya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore, 1986.

²²⁾ Akbar S. Ahmed, *Op. cit.*, h. 193-4 ; 219; 236; 243; terutama 248 dan 270.

civilization" (Benturan peradaban)²³⁾ Dengan kritis, semua warga dunia yang telah sadar akan munculnya era postmodernisme berhak untuk bertanya : Apa maksud sebenarnya menyebut-nyebut 'clash of civilization' ? Apakah setiap pergeseran paradigma (shifting paradigm) dalam wilayah budaya dan peradaban harus disebut sebagai 'clash of civilization' ? Bukankah ungkapan dan istilah seperti itu mengandung keinginan untuk mempertahankan "status quo" ?

Paradigma modernitas dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa yang dikategorikan dengan negara-negara berkembang memang menghadapi buah simalakama. Ibaratnya, jika ditelan ibunya mati, tapi jika tidak ditelan, bapaknya yang mati. Taruhlah sekedar sebagai ilustrasi, yakni persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga lagi gencar diberitakan oleh Pers Barat. Pers Barat-modern, disatu sisi, menuntut diberlakukannya HAM di dunia, tetapi begitu HAM tersebut juga dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk mempertanyakan "dominasi" negara-negara maju dalam banyak aspek -- yang pada gilirannya akan disebut oleh pers Barat sebagai "counter culture" --, maka tuduhan-tuduhan "fundamentalisme", "terrorisme" segera menghiasi surat kabar negara-negara maju.²⁴⁾ Erat kaitannya dengan itu, pers Barat pun lebih suka mengutip pernyataan-pernyataan tokoh radikal yang berasal dari negara-negara berkembang baik yang berdomisili di Barat maupun di Timur, untuk menambah kebenaran adanya "clash of civilization", sedang pemikiran dan pandangan-pandangan yang mempunyai bobot kearifan dan keserjanaan tidak pernah diangkat ke permukaan.²⁵⁾

Pemikiran postmodernisme akan segera mencatat segi kemenduaan atau standard ganda budaya modern-Barat. Negara-negara maju-modern menuntut diberlakukannya HAM di negara-negara berkembang, persis seperti standard yang mereka inginkan, tetapi begitu HAM tersebut dipergunakan oleh negara-negara berkembang dan lebih-lebih jika terkait dengan 'politik global', maka diangkatlah isu-isu sensasional seperti "clash of civilization". Bukankah ini merupakan cermin dari keinginan mempertahankan status quo dan memberlakukan standard baku tanpa mengenal keadaan sosio historis yang terus berubah, sehingga diperlukan proses dekonstruksi seperti yang diusulkan oleh para pemikir postmodernis.

²³⁾ Telaah presentasi Bernard Lewis "Root of Muslim Rage" yang diangkat dalam *Atlantic Monthly*, September 1990, juga yang baru-baru ini menghiasi polemik di surat-surat kabar di Indonesia, tulisan Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilization", *Foreign Affairs*, Summer 1993, h. 22-49.23)

²⁴⁾ John L. Esposito, *Op.cit.*, h. 175-180

²⁵⁾ Akbar S. Ahmed, *Op.cit.*, h. 194, 236.

Dialog agama & peradaban, bukan "clash of civilization"

Pemikiran deconstructionism, relativism dan pluralism, yang menyatu dalam wawasan postmodernisme mempunyai implikasi positif dan negatif terhadap pola hubungan antar agama, kebudayaan dan peradaban. Ia mempunyai dampak 'negatif', lantaran menguatnya pemikiran postmodernisme dalam masyarakat akan menggoncangkan tatanan yang sudah 'established' "standard", dan mapan. Dirasakan negatif, terutama bagi negara-negara yang terkena lontaran kritik dari berbagai pihak, namun, sebaliknya, akan dirasakan positif bagi lapisan masyarakat dan bangsa-bangsa dari dunia berkembang khususnya yang sedang tumbuh kesadaran akan hak-hak dan jati dirinya sebagai akibat langsung keberhasilan pendidikan yang mereka peroleh.

Bagi peradaban, budaya atau bangsa yang terkena arus pemikiran postmodernisme, maka bentuk dan jenis reaksi yang ditunjukkan kedepan akan menampakkan sejauhmana pengaruh negatif yang akan ditimbulkannya. Istilah "clash of civilization" new crusade, fundamentalism, fanaticism dan terrorism, adalah bentuk-bentuk reaksi yang bernada *pejorative* terhadap arus perubahan sejarah yang sebenarnya berjalan secara alami. Istilah-istilah tersebut mempunyai dampak yang tidak sedikit terhadap negara-negara berkembang yang selama ini selalu menjadi konsumen modernism. Tuntutan perlunya segera dibentuk tatanan 'dunia baru' menunjukkan bahwasanya paradigma modernisme ternyata sangat sarat dengan anomali-anomali. Anomali-anomali yang tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus.

Deru mesin "modernisme" lewat pendidikan yang bersifat massif membuahakan sikap kritis dalam melihat lingkungan sekitar serta hubungan antar peradaban pada umumnya. Dalam banyak hal, terdapat sejumlah bukti bahwa bapak atau ibu kandung postmodernisme, yakni, modernisme tidak lagi mau atau enggan mengakui kehadiran anak kandungnya sendiri (postmodernism). Begitu era postmodernisme lahir dan lambat laun bersikap sangat kritis terhadap *performance* bapak atau ibu kandungnya sendiri -- baik ditinjau dari, pengurusan sumber alam, kemewahan yang melimpah ruah, pencemaran lingkungan, limbah industri, mesin-mesin perang, budaya permissif, budaya konsumerisme, belum lagi kalau disebut-sebut era kolonialisme dan imperialisme, utang piutang negara-negara dunia berkembang yang semakin hari semakin membengkak dan lain sebagainya -- maka bapak kandung segera mencap anak kandungnya sebagai 'anak haram' yang tidak dikendaki kehadirannya. Terlalu gegabah, barangkali, jika dalam kasus ini kita ikut-ikutan mengambil tesis Weber bahwa semuanya itu dapat terjadi, sedikit banyak, juga dikarenakan keberhasilan etika Protestan. Meskipun

ada beberapa penulis Barat yang mencoba menganalisa demikian,²⁶⁾ tetapi bagi kita di Indonesia sangat gegabah untuk mengatakan demikian.

Peradaban 'modern' agaknya ingin selalu mengambil posisi -- kembali penulis mengambil analog dari analisa Kuhn -- "normal science". Kebiasaan memecahkan persoalan lewat cara-cara yang biasa berlaku secara konvensional, yakni cara-cara yang sudah 'standard', cara-cara yang sudah terbakukan dan mapan, ingin tetap dipertahankan oleh para praktisi yang ada dilapangan. Oleh karena terkurung oleh rutinitas, para praktisi di lapangan biasanya dan seringkali tidak menyadari adanya anomali-anomali yang melekat dalam wilayah "normal science". Hanya kalangan terbatas yang terdiri dari para pengamat, peneliti dan kritikus yang secara relatif dapat mengetahui dimana wilayah anomali-anomali tersebut. Pemikiran postmodernisme menempati posisi kedua ini.

Jika anomali-anomali yang kecil-kecil tersebut terakumulasi dan kemudian dapat diperoleh cara penyelesaian persoalan yang baru, yang lebih mendekati kebenaran dan lebih dapat menghindari keganjilan-keganjilan yang ada, maka akan muncul apa yang disebut oleh Kuhn dengan "revolutionary science" Dalam wilayah revolutionary science ini "changing paradigm" mulai menampakkan sosoknya. Cara pemecahan persoalan model lama sedikit demi sedikit ditinggalkan dan menuju cara pemahaman dan pemecahan yang baru.²⁷⁾

"Changing paradigm" dalam wilayah kebudayaan dan peradaban, menurut hemat penulis, perlu lewat media *dialog peradaban*, dan bukannya lewat "benturan peradaban" atau kebudayaan. Lewat proses dialog yang bersifat inklusif serta proses 'take and give' (saling memetik dan memberi manfaat) antar berbagai kebudayaan dan peradaban proses "changing paradigm" akan berjalan wajar, alami dan menguntungkan kedua belah pihak serta tidak menimbulkan gejolak sosial yang tidak perlu.

Pluralisme dan relativisme dalam menatap realitas kebudayaan dan peradaban memang demikian kenyataannya. Dalam era globalisasi budaya dan ilmu pengetahuan, klaim kebenaran (Truth claim) yang biasa melekat pada penganut agama-agama dan juga pada ilmuan dalam berbagai disiplin yang ada serta paradigma tunggal yang bersifat eksklusif, mau tidak mau, dapat dipastikan akan semakin tidak populer. Pernyataan demikian bukan sama sekali dimaksudkan untuk menggembosi atau melemahkan semangat misi dan dakwah, tetapi

²⁶⁾ White Lynn Jr., "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" yang dikutip oleh S. Parvez Manzoor, dalam Ziauddin Sardar (ed.), *The Touch of Midas : Science, Values and Environment in Islam and the West*, Manchester University Press, Manchester, 1984 h. 151-2.

²⁷⁾ Lihat footnote no.7.

persoalannya lebih pada bagaimana meningkatkan cara dan kualitas berdakwah dan melakukan misi keagamaan sesuai dengan tingkat tarap perkembangan pemikiran manusia, berkat sentuhan pendidikan dan globalisasi informasi dalam era postmodernism ini. Agak bersifat utopis kedengarannya, jika suatu penganut agama tertentu mengklaim bahwa misinya atau dakwahnya akan dapat merubah peta wilayah penganut agama-agama dunia dan menjadikan agama yang dianutnya sebagai satu-satunya agama yang bakal dianut oleh seluruh penduduk dunia. Jika memang begitu, maka "shifting paradigm" dalam pemikiran keberagamaan juga perlu dirumuskan lebih lanjut sesuai dengan tarap perkembangan pemikiran dan pengalaman keberagamaan manusia era postmodernism. Dalam era dominasi ilmu pengetahuan dengan jargon modernitas dan postmodernitas dengan berbagai implikasi dan konsekwensinya, agama-agama dunia memang perlu memiliki strategi misi dan dakwah yang lebih dialogis, ramah, dan inklusif, sehingga dapat menyentuh persoalan-persoalan 'kerohanian' dan "spiritualitas" keagamaan manusia pada umumnya, dari pada hanya sekedar menonjolkan simbol-simbol yang bersifat lahiriyah. Dengan begitu agama-agama dunia dapat diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk mengentaskan nestapa dunia modern dan postmodern, yang semakin hari semakin penuh kegalauan dan ketidakpastian psikologis.

Dialog antar agama-agama, budaya dan peradaban, untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan yang lebih dahsyat dimasa mendatang perlu lebih dikedepankan daripada sekedar mengklaim kebenaran "tunggal" agama-agama yang ada dengan implikasi ketertutupan dan eksklusifitas. Konsepsi ajaran agama yang bersifat inklusif (rahmatan lil 'alamin) dengan muatan nuansa-nuansa pemikiran postmodernism jauh lebih penting untuk dikedepankan dari pada hanya sekedar mengedepankan simbol-simbol dan kelembagaan agama yang seringkali memang terasa superfisial dan partikularistik.

Dengan begitu, para penganut agama-agama diharapkan dapat memahami nuansa pemikiran postmodernisme, yang menolak segala bentuk kemapanan, kemutlakan, standard baku dan kaku dalam berbagai diskursus, yang aturannya, tidak harus sampai ketinggian itu. Akhirnya, rumusan "Act locally and think globally (Berbuatlah secara lokal (menurut agama-agama masing-masing) dan berpikirlah secara global (menurut ukuran kemanusiaan universal) adalah cocok untuk kondisi pluralitas agama dan budaya. Manusia beragama tidak perlu bersikap apriori terhadap fenomena postmodernisme, karena memang demikianlah perkembangan dan sekaligus kenyataan historis yang harus dihadapi oleh umat manusia diseluruh dunia. Menurut hemat penulis, memahami alur

pemikiran postmodernisme dengan baik bukannya akan berdampak negatif terhadap keberagaman dan eksistensi agama-agama dunia, tetapi justru malah akan memperluas cakrawala dan wawasan para penganut agama-agama. Dengan memahami liku-liku pemikiran postmodernisme, maka persoalan pelik hubungan antar kebudayaan dan peradaban akan dapat dipahami secara dialogis-inklusif, bukannya dengan strategi "clash of civilization" (benturan peradaban). Untuk itulah, ketika penulis disodori judul "Benturan Peradaban", segera penulis rubah dengan "Dialog peradaban" karena yang belakangan jauh lebih kondusif dan favourable untuk menghadapi era postmodernisme dari pada yang pertama.

***) Mengingat arti penting kajian ini, karangan ini direncanakan untuk disajikan dalam forum seminar.**